

### **BAB III**

#### **TINJUAN UMUM TENTANG JUAL BELI**

##### **A. Pengertian Jual Beli**

Islam adalah agama yang sempurna, datang dengan mengatur hubungan antara Sang *Khaliq* (Allah SWT) dan makhluk, dalam ibadah untuk membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Islam datang dengan mengatur hubungan di antara sesama makhluk, sebagian mereka bersama sebagian yang lain, seperti jual beli, nikah, warisan, had dan yang lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang. Hal demikian secara umum didasari dalam konsep akad (transaksi).

Secara umum, akad (transaksi) terbagi tiga, yaitu :

1. Akad pertukaran secara murni, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan *syarikat* (perseroan) dan semisalnya;
2. Akad pemberian secara murni, seperti *hibah* (pemberian), sedekah, pinjaman, jaminan, dan semisalnya;
3. Akad pemberian dan pertukaran secara bersama-sama, seperti *qardh* (hutang), maka ia termasuk pemberian karena ia dalam makna sedekah, dan pertukaran di mana ia dikembalikan dengan semisalnya.

Secara terminologi, jual beli atau perdagangan berarti “*al-Bai*”, “*al-Tijarah*”, “*al-Mubadalah*” dan *asy\_syira*’ mengandung makna menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h. 111. Lihat Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-XVIII, h. 6.

Berkenaan dengan kata lain dari *bai'* (jual beli) sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :



Artinya: “.....mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,” (TQS. Fathir [35]: 29)<sup>2</sup>

Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain :<sup>3</sup>

1. Menurut ulama Hanafiyah :

وجه

‘Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).’

2. Menurut Imam Nawawi :

بمال تمليكا

‘Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan’

3. Menurut Ibnu Qudamah :

مال تمليكا

‘Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.’

4. Menurut Yusanto dan Arif Yunus, jual beli atau perdagangan adalah tukar menukar suatu harta dengan harta sebagai pengalihan pemilikan melalui jalan saling meridhai.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 437.

<sup>3</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. Cet. Ke-4, h. 73-74.

<sup>4</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), Cet. Ke-1, h. 234.

Dari beberapa pengertian di atas, Ahmad Sarwat menyimpulkan pengertian jual beli, "menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".<sup>5</sup>

Seyogyanya, masih para ulama dan ekonom muslim yang mencoba merumuskan pengertian tentang jual beli atau perdagangan, di antaranya sebagaimana pengertian yang dikemukakan di atas. Namun, dari beberapa pengertian dikemukakan oleh para ulama di atas, sehingga dapat dipahami bahwa jual atau perdagangan adalah akad (transaksi) tukar menukar barang atau jasa yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak kepemilikan. Adapun kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan individu (*private property*). Menurut Zulhelmy, kepemilikan dalam perspektif Islam dibagi tiga, yaitu kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*collective property*), dan kepemilikan Negara (*state property*).<sup>6</sup>

Menurut An-Nabhani ada beberapa sebab terjadinya perpindahan kepemilikan, yaitu :

1. Bekerja; seperti berdagang, menghidupkan tanah mati, menggali kandungan dalam perut bumi atau diudara, berburu, makelar (broker), mudharabah, musaqat (mengairi lahan pertanian), ijarah (kontrak kerja) dan lain sebagainya.
2. Pewarisan;
3. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup

---

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), Cet. Ke-1, h. 8.

<sup>6</sup> Zulhelmy Mohd Hatta, *Isu-isu Kontemporer Ekonomi Islam-Suatu Pendekatan Institusional*, (Bogor Al-Azhar Fresh zone Publishing, 2012), Cet. Ke-1, h. 14.

4. Pemberian harta Negara untuk rakyat
5. Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengeluarkan kompensasi berupa harta atau tenaga.<sup>7</sup>

Dari beberapa sebab kepemilikan di atas terlihat jelas bahwa bekerja merupakan salah satu sebab kepemilikan, sementara berdagang atau menjual beli merupakan salah kriteria dari aktivitas bekerja yang disyariatkan oleh Allah SWT dan juga merupakan salah satu sebab terjadinya perpindahan kepemilikan. Sehingga menurut Yusanto dan Yunus<sup>8</sup>, jual beli atau perdagangan pada prinsipnya adalah pertukaran suatu komoditas dengan komoditas lain yang berbeda; atau komoditas sesuatu dengan alat tukar berupa uang.

## B. Landasan Hukum Jual Beli

Dasar hukum dalam membahas masalah jual beli atau perdagangan dapat ditelusuri dari kitabullah dan al-Hadits Nabi SAW, sebagai berikut :

### 1. Sumber Hukum Kitabullah

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>9</sup>  
(TQS. Al-Baqarah [2]: 275)<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, Diterjemahkan oleh Hafiz Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit HTI, 2010), Cet. Ke-VI, h. 95-96.

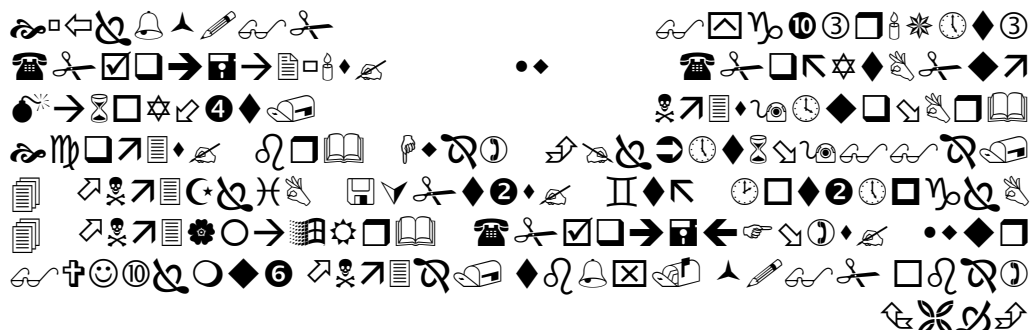
<sup>8</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 47.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam perspektif al-Quran jual beli atau perdagangan dibagi menjadi dua pembagian, yaitu jual beli yang halal, yaitu perdagangan atau jual beli itu sendiri; dan jual beli haram, yaitu riba. Keduanya merupakan bentuk akad (transaksi) perdagangan yang terjadi dalam masyarakat antara penjual dan pembeli. Meskipun demikian, dua jenis perdagangan tersebut ada dibenarkan (boleh) menurut ketentuan syara' dan ada yang dilarang oleh syara'. Dengan demikian, pembatasan dari kebolehan atau tidaknya suatu transaksi (akad) dalam jual beli atau perdagangan di antaranya adalah dibenarkan atau tidak dibenarkan oleh syara'.

Selanjutnya, dalam membahas jual beli atau perdagangan, Allah SWT berfirman :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (TQS. An-Nisaa’ [4]: 29)<sup>11</sup>

Allah SWT juga berfirman:



<sup>11</sup> Ibid., h. 83.

Artinya: '...Persaksikanlah, apabila kalian berjual beli...' (TQS. Al-Baqarah [2]: 282)<sup>12</sup>

Dari beberapa ayat di atas merupakan di antara ayat al-Qur'an yang membahas masalah jual beli atau perdagangan. Bila ditelusuri lebih lanjut, masih terdapat banyak ayat dalam surat yang lain yang membahas tentang akad (transaksi) jual beli atau perdagangan. Selanjutnya, secara harfiah dari surat an-Nisa [4] ayat 29 dapat dipahami bahwa Islam menetapkan dan mensyaratkan adanya saling suka sama suka dalam transaksi (akad) jual beli atau perdagangan yang terjadi. Transaksi suka sama suka merupakan salah aspek penentu dan penting, ketika transaksi yang dilakukan dikategorikan sebagai transaksi (akad) yang dibolehkan (halal), begitu sebaliknya. Dengan demikian, jual beli atau perdagangan tidak boleh berlangsung karena tekanan, paksaan, atau intimidasi. Menurut Yusanto dan Yunus,<sup>13</sup> aktualisasi dari adanya sikap saling meridhai adanya ijab dan qabul yang termasuk rukun dalam jual beli tersebut.

Di samping itu, dalam surat al-Baqarah [2] ayat 282, secara harfiah dapat juga dipahami bahwa perlunya persaksian dari transaksi (akad) jual beli yang dilakukan. Namun, bila dipahami secara utuh dari surat tersebut, di mana persaksian diperlukan dalam akad (transaksi) jual beli secara kredit; dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah murabahah; dan tidak berlaku dalam akad (transaksi) jual beli secara tunai atau kontan.

## 2. Sumber Hukum al-Hadits

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>13</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus,

Membahas masalah jual beli atau perdagangan dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi SAW, di antaranya sebagai berikut :

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه قال: سمعت أباسعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلعم: البيع

Artinya: ‘sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling meridhai’ [HR. Ibnu Majjah, No. 2185]<sup>14</sup>

Rasulullah SAW dalam banyak hadits mempertegas kehalalan aktivitas perdagangan. Rasulullah SAW bersabda :

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

Artinya: ‘Dua orang penjual – pembeli – berada dalam pilihan, selama belum berpisah’ [HR. Bukhari]<sup>15</sup>

Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama Rufa’ah keluar menuju Mushalla. Kemudian, Beliau SAW menyaksikan orang-orang sedang berjual beli. Beliau segera berseru, ‘Hai para pedagang! “Mereka lalu mengangkat kepala dan pandangan mereka tertuju kepada Beliau SAW memenuhi panggilannya.” Beliau selanjutnya bersabda :

إِنَّ الثَّجَارَ يَبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَّارٌ

Artinya: ‘Para pedagang nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai para pendosa, kecuali mereka yang bertakwa, berlaku baik dan jujur.’ [HR. at-Tirmidzi]<sup>16</sup>

Abu Said meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda :

التَّاجِرُ الصَّدَقُ الْأَمِينُ مَعَ الْبَيِّنِ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ

<sup>14</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qozwaini Ibnu Majjah, *Sunnan Ibnu Majjah*, (Riyadh: Maktabah AL-Maarif, 273H), Cet. Ke-1, h. 376

<sup>15</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bukhari Abu Abdullah, *Al-Jami’ Al-Musnad Al-Shaheh Al-Mukhtashor min Umuuri Rasulullah SAW wa Ayyaam*, (Beirut: Dar Thuq Al-Najjah, 1422 H), h.

<sup>16</sup> Imam Al-Hafiz Abi Abdullah Al-Hakim Al-Nisaburi, *Al-Mustadrok ala Al-Shohihaini*, (Kairo: Dar Al-Haromain, 1997), Cet. 1, Juz. 2, h. 8.

Artinya: ‘Pedagang yang jujur lagi percaya, kelak akan bersama-sama para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada’.’ [HR. at-Tirmidzi]<sup>17</sup>

Dari beberapa hadits dalam membahas masalah jual beli atau perdagangan sebagaimana yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW sangat menginginkan dalam akad (transaksi) tersebut harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Sehingga dengan senantiasa selalu berpedoman kepada ketentuan yang disyariatkan oleh Allah SWT, sehingga harta yang diperoleh dari perdagangan yang merupakan sebab dari perpindahan kepemilikan termasuk ke dalam harta yang halal dan tidak merupakan harta yang haram. Hal demikian diatur agar setiap harta yang diperoleh di antaranya melalui jual beli atau perdagangan tidak tergolong ke dalam harta yang bathil.

### **C. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Rukun dan syarat jual beli merupakan perkara-perkara yang harus ada saat melakukan transaksi jual beli, agar transaksi (akad) tersebut menjadi sah menurut syara’. Dari tulisan para ulama dan ekonom muslim, banyak menulis rukun dan syarat-syarat yang harus ada dalam transaksi (akad) jual beli. Namun, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan rukun jual beli.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha); kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Karena, unsur

---

<sup>17</sup> *Ibid.*



kerelaan itu unsur hati yang sulit untuk diindera, sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli adalah ijab dan qabul; atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>18</sup>

Sementara menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu (1) ada orang yang berakad (penjual dan pembeli); (2) ada sighat (lafal ijab dan qabul); (3) ada barang yang dibeli; (4) ada nilai tukar pengganti barang. Dalam hal ini, menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun dari jual beli.<sup>19</sup>

Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai rukun dan syarat dalam jual beli, namun perbedaannya hanya dari aspek penempatan poin-poin yang ditetapkan dalam rukun dan syarat akad tersebut. Sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah hanya menetapkan satu syarat saja dan berbeda dengan pendapat jumhur ulama, yaitu ijab dan qabul; yang merupakan implementasi dari kerelaan dalam akad transaksi jual beli. Tetapi, ulama Hanafiyah menetapkan beberapa rukun yang ditetapkan oleh jumhur ulama ke dalam syarat yang harus diperhatikan dalam akad (transaksi) jual beli.

Di samping untuk sahnya akad (transaksi) jual beli yang dilakukan, maka harus diperhatikan beberapa syarat yang membuat akad (transaksi)

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h. 115.

<sup>19</sup> *Ibid*.

tersebut menjadi sah. Menurut Syafii, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, sebagai berikut :

1. Syarat penjual dan pembeli, dengan syarat :
  - a. Berakal, bagi yang gila, bodoh dan lainnya tidak sah melakukan transaksi jual beli;
  - b. Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa;
  - c. Keadaan tidak mubazir (pemboros) orang pemboros, hartanya di bawah pengawasan wali.<sup>20</sup>
  - d. Yang berakad adalah orang yang berbeda artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus sebagai pembeli.<sup>21</sup>
2. Syarat uang atau benda yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat:
  - a. Suci; najis tidak sah dijadikan uang atau tidak sah untuk dijual;
  - b. Bermanfaat; tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya;
  - c. Dapat dikuasai dan dapat diserahkan; tidak sah memperjualbelikan sesuatu yang tidak dikuasai, seperti menjual burung yang sedang terbang;
  - d. Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil;
  - e. Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifat benda tersebut.<sup>22</sup>

Dalam menetapkan syarat harga dalam transaksi jual beli, yaitu :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya;
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila, harga barang

---

<sup>20</sup> Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 46.

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h. 116.

<sup>22</sup> Syafii Jafri, *Loc. Cit*.

dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas;

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang menjadi nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi, khamr, karena kedua jenis benda tersebut tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak termasuk barang ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Karena kedua barang tersebut secara jelas diharamkan oleh syara'.<sup>23</sup>

Di samping syarat di atas, ulama fiqh juga menetapkan beberapa syarat lain, seperti :

- a. Syarat sahnya jual beli

Dalam hal ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) Jual beli baru dianggap sah, ketika terhindar dari cacat; (2) Apabila barang yang diperjualbelikan termasuk benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli, dan harga barang dikuasai penjual. Apabila barang yang diperjualbelikan tergolong ke dalam jenis barang tidak bergerak, maka boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan *urf* setempat.

- b. Syarat terkait dengan pelaksanaan jual beli.

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h. 119.

mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Jual beli semacam ini dikenal dalam istilah fiqh dengan *bai' al-fudhuli*.

Di kalangan ulama berbeda pendapat dalam masalah *bai' al-fudhuli*; Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan justifikasi (persetujuan) dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya.

Menurut ulama Malikiyah, *bai' al-fudhuli* adalah salah satu bentuk jual beli yang sah, baik dalam menjual maupun dalam membeli dengan syarat diizinkan oleh orang yang diwakilinya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *bai' al-fudhuli* tidak sah, baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang, maupun ditunjuk untuk menjualnya, maka jual beli baru dianggap sah ketika mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut ulama Syafiiyah dan Zahiriyah, di mana *bai' al-fudhuli* dianggap tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilinya.<sup>24</sup>

c. Syarat terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 119-120.

mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

### 3. Syarat *sighat* akad dalam jual beli.

Dalam hal ini, para ulama fiqh sepakat bahwa *sighat* akad merupakan unsur utama dalam jual beli. Karena, kerelaan dari transaksi jual beli dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilakukan. *Ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi jual beli yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Terhadap transaksi yang mengikat salah satu pihak, seperti wakaf, wasiat, hibah dan sebagainya; tidak perlu adanya *qabul*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijab* saja.<sup>25</sup> Bahkan menurut Ibnu Taimiyyah, ulama fiqh Hanbali dan sebagian ulama lainnya, *ijab* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.<sup>26</sup> Dengan demikian, ada beberapa syarat *ijab* dan *qabul*, yaitu: (a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal; (b) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*; (c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis; artinya kedua belah pihak hadir dalam membahas topik yang sama;<sup>27</sup>

Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang jarak waktu dalam *ijab* dan *qabul*. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafiiyah dan Hanabilah

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 116.

<sup>26</sup> Muhammad Yusuf Musa, *al-Amwaal wa Nazhariyyah al-'Aqad*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), h. 255.

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Loc. Cit.*

berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.<sup>28</sup>

Dengan demikian, apabila beberapa syarat dalam akad (transaksi) jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum akad (transaksi) jual beli dianggap sah dan bersifat mengikat; dan karenanya kedua belah pihak tidak boleh lagi membatalkan akad (transaksi) jual beli yang dilakukan. Begitu sebaliknya, bila rukun dan syarat tidak terpenuhi dalam akad (transaksi) jual beli, maka jual beli dianggap batal.

Menurut As-Sabatin, batil (*buthlan*) adalah lawan dari '*ash-Shihah*' (sah/abash), yaitu ketidaksesuaian dengan ketentuan *asy-Syari*' (Allah SWT); yang dimaksudkan dan diinginkan dengan *al-Buthlan* adalah tidak adanya penetapan implikasi perbuatan di dunia dan adanya penetapan sanksi di akhirat.. Maknanya, perbuatan itu tidak berpahala, tidak membebaskan tanggungan dan tidak menggugurkan kewajiban qadha'. Jual beli misalnya, jika salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka jual beli menjadi batil.<sup>29</sup>

#### **D. Kaidah-kaidah Pokok dalam Jual Beli**

Menurut Yusanto dan Yunus, ada beberapa kaidah pokok dalam perdagangan (jual beli), yaitu :<sup>30</sup>

1. Segala sesuatu yang diharamkan, haram pula memperjualbelikannya

---

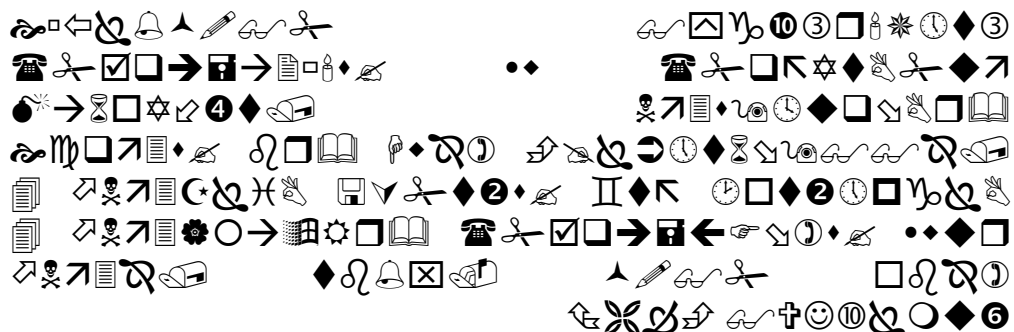
<sup>28</sup> *Ibid*, h. 118.

<sup>29</sup> Yusuf As-Sabatin, *al-Buyu' al-Qaadimah wa al-Mu'ashirah wa al-Burshat al-Mahaliyah wa ad-Duwalayah*, Diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktek Bisnis ala Kapitalis*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), Cet. 1, h. 32.

<sup>30</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op. Cit*, h. 239-242.

Terdapat beberapa benda yang diharamkan oleh Allah SWT untuk memakannya, seperti daging babi, bangkai, darah, dan lain sebagainya; yang diharamkan untuk meminumnya, seperti *khamr*; yang diharamkan untuk memasangnya seperti patung; dan diharamkan dalam pembuatannya seperti lukisan bernyawa. Benda-benda tersebut telah ditegaskan secara jelas oleh asy-Syari' (Allah SWT) keharamannya dalam banyak nash, baik Kitabullah maupun as-Sunnah Rasulullah SAW.

Pengharaman komoditas tersebut diikuti pula dengan oleh keharaman memperdagangkannya, baik menjual maupun membelinya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut tergolong sebagai harta yang diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana larangan memperoleh harta dengan cara bathi yang dijelaskan dalam firman-Nya :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (TQS. An-Nisaa’ [4]: 29)<sup>31</sup>

## 2. Menjualbelikan barang yang sudah dijual adalah haram

Seorang penjual tidak diperbolehkan membatalkan akad (transaksi) jual beli yang disepakati dan kemudian ditawarkan kepada orang lain agar memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Jual beli yang demikian adalah

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 83.

haram. Begitu juga halnya dengan membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Haram pula melakukan penawaran atas barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Padahal dia tahu orang yang itu rela atas barangnya atau harganya.

### 3. Tidak dibolehkan menjual barang yang tidak dimiliki

Berbagai nash telah menyebutkan bahwa ketidakbolehan menjual barang sebelum secara sempurna barang tersebut dimiliki. Jual beli yang dilakukan dalam kondisi seperti ini dianggap sebagai jual beli yang bathil. Karena tidak memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam jual beli itu sendiri. Adapun bentuk rill dari praktek jual beli ini, di mana seseorang pembeli hendak membeli suatu barang dari orang penjual yang sebenarnya tidak memiliki barang tersebut. Setelah tercapai kesepakatan harga, penjual barulah mencari dan membeli barang yang disepakati tersebut. Dalam transaksi ini tampaklah bahwa pada saat akad (transaksi) barang yang menjadi obyek diperjualbelikan tidak ada pada pedagang, sehingga jual beli seperti ini adalah diharamkan.

### 4. Tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi

Dalam jual beli, dilarang terjadi dua akad sekaligus seperti jual beli dan sewa. Hal demikian sebagaimana Nabi SAW bersabda :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عن صفقتين فى صفقة واحدة

Artinya: ‘Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu akad’ [HR. Ahmad]<sup>32</sup>

Menurut para ulama makna “*syafqatayn fi syafqah waahidah*” itu adalah dua akad dalam satu transaksi, atau dua transaksi dalam satu akad, atau adanya akad yang disyaratkan dengan akad lain. Kemudian, larangan Rasulullah SAW tersebut merujuk pada akadnya sendiri. Karena itu, larangan

---

<sup>32</sup> Imam Ahmad, *Sunan Imam Ahmad*, Diterjemahkan oleh Mohd. Zuhri, dkk, (Semarang: L Asy-Syifa, 1992), h. 321.



tersebut membuat akad seperti itu statusnya bathil.<sup>33</sup> Dengan demikian, larangan Rasulullah SAW bersifat mutlak dalam setiap bentuk akad (transaksi) yang dilakukan, ketika di dalamnya terjadi dua bentuk akad dalam satu akad, maka akad (transaksi) yang dilakukan adalah diharamkan. Misalnya, seseorang melakukan akad gadaai (*rahn*), kemudian dalam akad tersebut disertai adanya akad jasa (*ijarah*). Hal demikian jelaslah keharamannya.

Beberapa kaidah pokok dalam jual beli (perdagangan) di atas harus diperhatikan, di samping rukun dan syarat yang harus ada dan menyertai akad (transaksi) jual beli. Karena, beberapa kaidah tersebut merupakan kaidah pokok yang lahir dari ketentuan yang ditetapkan syara' (Kitabullah dan Sunnah Rasul SAW) dalam akad (transaksi) jual beli yang terjadi. Dengan terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli serta memperhatikan kaidah-kaidah pokok dalam jual beli, maka akad (transaksi) yang dilakukan menjadi sah, begitu juga sebaliknya.

#### **E. Pembagian Jual Beli**

Dalam melakukan aktivitas jual beli, seorang muslim harus terikat dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jual beli yang telah ditetapkan oleh syara' (Allah SWT). Ketentuan tersebut menyangkut jenis barang yang diperjualbelikan serta ketentuan akad (transaksi) jual beli yang dilakukan. Menurut Islam, setiap memperjualbelikan barang yang halal, maka hukumnya adalah halal, begitu sebaliknya, memperjualbelikan barang yang haram, maka haram pula hukumnya.

---

<sup>33</sup> Yahya Abdurrahman, *Pegadaian dalam Pandang Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), Cet. Ke-1, h. 59.

Selain berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, sahnyanya akad transaksi jual beli di dalam Islam tergantung juga pada jenis jual beli yang dilakukan; apakah memenuhi ketentuan akad atau tidak. Adapun macam jual beli yang dibolehkan adalah jual beli salam, *khiyar*, murabahah, dan lain sebagainya. Sementara macam-macam jual beli yang diharamkan adalah riba, jual beli yang menjurus kepada riba, jual beli samar, jual beli syarat, jual beli karena penipuan.

Meskipun demikian, secara natural jual beli ada secara kontan dan ada pula secara kredit. Jual beli secara kontan merupakan akad (transaksi) jual beli, di mana pembeli langsung memperoleh barang yang diperjualbelikan, sementara penjual memperoleh alat tukar (uang) sebagai pengganti dari barang yang telah dijual. Sementara jual beli secara kredit dalam istilah fiqh dikenal dengan istilah *bai' murabahah*, yaitu perpindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli, di mana pembayarannya terjadi secara kredit atau hutang, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Yusanto dan Yunus, dalam jual beli *murabahah*, seorang penjual berhak untuk membuat dua harga, yaitu harga kontan dan harga utang sekaligus atau harga kredit dengan cicilan. Penjual dan pembeli diperbolehkan untuk saling tawar menawar harga tersebut sesuai kecocokan dari kedua belah pihak. Jika keduanya telah sepakat baik dari segi barang maupun harga, barulah terjadi akad (transaksi) jual beli. Kemudian, ditegaskan oleh Yusanto dan Yunus bahwa dalam akad (transaksi) jual beli *murabahah* jika pada waktu yang disepakati pembeli dengan cara hutang atau kredit tidak memenuhinya (membayar hutang), maka harga tidak boleh bertambah; harga harus bersifat

tetap. Jika tidak, maka kedua belah pihak telah terjerumus ke dalam praktek ribawi;<sup>34</sup> yang dilarang oleh Allah SWT.

Hal demikian sebagaimana dijelaskan oleh dalam firman-Nya :



Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”  
(TQS. Al-Baqarah [2]: 275)<sup>35</sup>

Dari dalil di atas terlihat jelas perbedaan antara jual beli yang merupakan akad (transaksi) yang halal dan dibolehkan dan riba yang juga merupakan bentuk jual beli yang diharamkan dan dilarang. Dengan demikian, dapat juga dipahami bahwa dalam perspektif al-Qur'an secara umum juga ditemukan dua jenis jual beli, yaitu jual beli halal, yaitu perdagangan dan jual beli haram, yaitu riba.

#### F. Hikmah Disyariatkan Jual Beli

Menurut Al-Tuwaijri, uang, komoditi, dan harta benda yang dimiliki manusia, sebagai alat tukar bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, Allah SWT membolehkan perdagangan sebagai bentuk aktifitas bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jual beli merupakan bentuk aktifitas yang di dalamnya bertujuan untuk merealisasikan kemashlahatan dan memadamkan kejahatan (kriminal) yang dilakukan manusia.<sup>36</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dipahami bahwa secara umum hikmah (manfaat) disyariatkan jual beli oleh Allah SWT agar terealisasi kemaslahatan

<sup>34</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op. Cit*, h. 244.

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 48.

<sup>36</sup> Muhammad bin Ibrahim Al-Tuwaijri, *Mukhtashor fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 2012), h. 5.

di antara manusia. Bentuk kemaslahatan dari transaksi tersebut berupa terjadinya interaksi antara satu sama lain, tersebarnya uang di tengah masyarakat, tidak terjadinya penumpukkan harta kekayaan pada sekelompok orang. Sehingga dengan terealisasinya kemaslahatan tersebut, maka dapat menghindari berbagai tindakan kejahatan (kriminalitas) yang dilakukan oleh manusia.